

THE EXISTENCE OF JAVANESE ETHNIC IN THE TOWN OF JANTHO

Munadia Yunady Azmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: putrinq98@gmail.com

Ikhwan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: ikhwan@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper is entitled The Existence of Javanese Ethnic in The Town of Jantho. This scientific study focuses on the history of the existence of Javanese ethnic during transmigration program to the Town of Jantho Aceh Besar. The purpose of this paper is to examine further about the identification of the number of Javanese Ethnic, fields of livelihood, ethnic interaction with local communities, and factors supporting and inhibiting the existence of Javanese Ethnic. The research used a qualitative approach with observation, interview, and documentation. The data were analyzed through a descriptive qualitative approach. The results showed that the transmigration process in Aceh began during the New Order era. The presence of Javanese ethnics to Jantho through various stages under the direction of government programs starting through providing various kinds of infrastructures. The type of economy they develop is agriculture/plantation, household economy, traders, and others. This is advantageous for them compared to their narrow area of employment in Java. Javanese ethnic maintains harmony among each other well. The supporting factors consist of infrastructure, mixed marriage, culture, and social, while the inhibiting factor is conflict.

Keywords: *Existence, Javanese ethnic, Town of Jantho*

EKSISTENSI ETNIS JAWA DI KOTA JANTHO

Abstrak

Kajian ilmiah ini berfokus pada sejarah eksistensi etnis Jawa dalam program transmigrasi ke Kota Jantho Aceh Besar. Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai identifikasi jumlah keberadaan Etnis Jawa, jenis dan bidang mata pencaharian, interaksi Etnis Jawa dengan masyarakat lokal, dan faktor pendukung dan penghambat eksistensi Etnis Jawa. Jenis penelitian yang digunakan, pendekatan kualitatif dengan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transmigrasi khususnya ke daerah Aceh dimulai pada masa orde baru. Kehadiran Etnis Jawa ke Jantho melalui berbagai macam tahapan di bawah arahan program pemerintahan dengan menyediakan berbagai macam infrastruktur pada awal mulanya. Jenis ekonomi yang mereka kembangkan ialah dari segi pertanian/perkebunan, ekonomi rumah tangga, pedagang, dan lainnya. ini sangat menguntungkan bagi mereka dibandingkan pada daerahnya yang sempit dari lapangan kerja. Etnis Jawa sangat menjaga keharmonisan sesama. Adapun faktor

pendukungnya yang terdiri dari infrastruktur, perkawinan campuran, budaya, dan social, dan faktor penghambatnya adalah konflik.

Kata Kunci: *Eksistensi; etnis Jawa; Kota Jantho*

Pendahuluan

Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, atau dengan kata lain golongan orang sebagian dari kaum seketurunan yang berada di antara marga dan bangsa-bangsa (Poewadarminta 2008). Suatu suku bangsa memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas yang biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Seperti suku Bangsa Aceh, yang merupakan hasil pembauran dengan bangsa-bangsa pendatang dan beberapa suku bangsa asli di Sumatra, yaitu dari Arab, India, Parsi, Turki, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Jawa, dan lain-lain. Asimilasi suku bangsa Aceh dengan suku bangsa lain melahirkan suku bangsa baru yaitu suku bangsa Aneuk Jame yang merupakan pembauran suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa Aceh, dan juga Singkil yang merupakan pembauran suku bangsa Batak Dairi dengan suku bangsa Aceh (Hidayah 2015).

Suku Bangsa Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak dibagian barat wilayah Indonesia. Daerah ini dahulunya dijuluki dengan daerah Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Bumi Iskandar Muda. Provinsinya sendiri mendapat status “Daerah Istimewa” pada tahun 1959, akan tetapi untuk sekarang sebutan daerah istimewa itu tidak dipakai lagi. Suku bangsa Aceh boleh berbangga karena daerah mereka adalah pintu gerbang pertama masuknya budaya Islam ke Indonesia, yaitu sekitar abad ke-12-14 Masehi (Hidayah 2015). Letak geografis Aceh sangat strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan bandar transite berbagai suku bangsa dari berbagai belahan dunia.

Faktor geografis ini telah berdampak terhadap perkembangan suku bangsa di Aceh karena banyak penduduk dari luar yang bermigrasi ke Aceh dengan berbagai keperluan baik berdagang, menuntut ilmu, dan sebagainya.

Tidak sedikit dari para pendatang itu yang tinggal dan menetap di Aceh. Proses ini dinamakan dengan istilah migrasi yang merupakan segala gerak horizontal untuk pindah tempat tinggal dan pindahannya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi, pindah keunit administrasi lain, misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara, dengan kata lain migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu unit geografis keunit geografis lainnya (Ahmadi 1991).

Permasalahan ini sama halnya dengan apa yang dialami oleh masyarakat etnis Jawa yang melakukan transmigrasi kedaerah-daerah yang minim penduduk seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Nova 2016). Praktek transmigrasi tersebut tidak terlepas dari program pemerintah Indonesia untuk melakukan penyebaran penduduk secara merata di Indonesia, proses tersebut terjadi pada masyarakat Pulau Jawa, dikarenakan keadaan kependudukan mereka sangat padat dibandingkan dengan masyarakat

pada pulau-pulau lainnya. Salah satunya yaitu di Aceh, yang mempunyai masyarakat Transmigrasi berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, namun Suku Jawa menjadi suku yang paling dominan dalam transmigrasi tersebut. Transmigrasi Jawa yang datang ke Aceh mayoritas dari mereka menempati daerah Aceh Barat, Nagan raya, Gayo lues, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Di bagian Aceh Besar yang paling banyak etnis Jawa berada di Kota Jantho dan Saree Lembah Seulawah, disebabkan pada daerah tersebut masih sangat minim daripada penduduk lokal, dan bisa dikatakan kondisi tempat tersebut masih dikelilingi oleh hutan rimba.

Problema kependudukan menjadi masalah besar pada saat itu, dengan mengalami kepadatan penduduk sehingga berbagai masalah muncul dalam masyarakat terutama dalam faktor ekonomi sebab sempitnya lapangan pekerjaan dan ditambah lagi pada saat itu negara sedang menghadapi konflik dan peperangan. Hal ini membuat sebagian masyarakat memilih untuk merantau kedaerah

lain untuk mencari pekerjaan baik menjadi pedangang, buruh, tukang ataupun lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (Amanda 2017).

Proses perantauan tersebut awalnya dibawah kendalian pemerintah seperti pada masyarakat Gampong Baru Jantho dengan disediakan fasilitas-fasilitas seperti rumah dan lainnya, akan tetapi untuk selanjutnya mereka melakukan sendiri tanpa ada kaitan dengan pemerintah lagi. Pada Gampong Jantho Baru, di mana pada daerah tersebut mayoritas masyarakatnya ialah pendatang, baik dari luar Aceh seperti Jawa, Padang, maupun dari masyarakat lokal Aceh seperti dari Selimum, Peukan Bada, Pidie, dan lainnya. Teruntuk masyarakat yang beretnis Jawa mereka mempunyai desa sendiri terkhusus untuk mereka tanpa ada campuran dari masyarakat lokal Aceh, dengan menggunakan tradisi, dan budaya mereka dalam kegiatan-kegiatan yang mereka adakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam

tentang keberadaan etnis Jawa pada kabupaten Aceh Besar tepatnya pada Gampong Jantho Baru, dengan paparan judul “Eksistensi Etnis Jawa Di Kota Jantho”.

Identifikasi jumlah keberadaan Etnis Jawa

Sebagai bentuk “politik etis/ politik balas budi” yang diunggah oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1900, kepada masyarakat pribumi bagi negara jajahannya yakni Indonesia, maka semboyan yang didengung-dengungkan adalah pendidikan, irigasi, dan migrasi, hingga pada tahun 1905 menjadi cikal bakal transmigrasi masa kini (Rustiadi) Ada bagian posisi transmigrasi sesuai tahunnya yaitu:

1. Transmigrasi yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 1947.
2. Pada tahun 1948 Transmigrasi berada di bawah Departemen dalam Negeri.
3. Sebagai dinas dari Departemen Pembangunan Daerah transmigrasi kembali ke Departemen Sosial sebelum

dijadikan Departemen pada tahun 1957.

4. Sejak tahun 1959 Transmigrasi digabungkan dengan Departemen Koperasi dan Pembangunan masyarakat desa dalam tiga bentuk yang berbeda.
5. Kemudian dipindahkan ke Departemen dalam negeri, selanjutnya ke Departemen Vetaran, setelah itu kembali lagi ke Departemen Koperasi. Lalu tidak lama setelah itu dipindahkan ke Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dan akhirnya sepenuhnya menjadi Departemen Transmigrasi pada tahun 1983.

Pada awal tahun 70-an berlangsung pembaruan transmigrasi dalam iklim politik dan ekonomi yang sangat khas. Pada era Sukarno yang diwarnai dengan nasionalisme dan perjuangan antiimperialis hingga berakhir dengan pertumpahan darah pada tahun 1965. Dilanjutkan dengan era Suharto dengan sikapnya pro-Barat mendapatkan dukungan dunia dari Dana Moneter Internasioanl (IMF)

dan Bank Dunia untuk membangkitkan kembali perekonomian yang terpuruk. Sehingga dibentuklah Pelita I pada tahun 1969 dengan dua perencanaan yang ingin dicapai:

1. Intensifikasi pembudidayaan padi, berkat program Revolusi Hijau;

2. Perluasan lahan garapan, berkat program transmigrasi.

Pelaksanaan kedua pada Pelita pertama ditandai dengan pembangunan infrasrtuktur secara besar-besaran. Pada Pelita III dan IV merupakan "masa target" pada tahun 1979-1984 ditetapkan sebanyak 500.000 kepala keluarga, yaitu lebih dari dua juta jiwa. Dikarenakan Deptrans ragu-ragu maka Departemen pekerjaan umum menyatakan membantu untuk menghadapi tantangan transmigrasi. Lalu Pemerintah memutuskan untuk membagi tugas kepada departemen-departemen yang terkait:

1. Departemen pekerjaan umum bertugas mempersiapkan lokasi.

2. Deptrans bertugas untuk merekrut anggota,

memindahkan dan membina para anggota transmigran.

3. Departemen pertanian bertugas untuk mengurus masalah pertanian.
4. Departemen kesehatan mendirikan puskesmas.
5. Departemen agama mengurus tempat ibadah (Levang 2003).

Untuk memecahkan masalah koordinasi dari departemen yang terkait di atas sehingga pemerintah memutuskan untuk menciptakan instansi yang dinamakan dengan Badan Koordinasi Transmigrasi (Bakrotrans). Maka mulai saat itu Transmigrasi menjadi prioritas. Pada masa Pelita IV (1984-1989) lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan meningkat Industri guna untuk dapat mewujudkan mesin Industri sendiri. Serta fokus utamanya adalah pada program KB dan rumah untuk keluarga, kemudian pada Pelita IV ini juga menitik beratkan pada pembangunan yang merujuk pada kebijakan INPRES No. 5 tahun 1985 yang menyatakan bahwa: untuk meningkat ekspor Non-Migas dan

mengurangi biaya tinggi. Tujuannya adalah:

1. Pengembangan geologi dan sumber daya mineral.
2. Program pembangunan pertambangan.
3. Program pengembangan usaha rakyat terpadu.

Hasilnya adalah Swasembada pangan tercapai dibuktikan dengan jumlah produksi peranak Indonesia 25, 8 ton sehingga mendapat penghargaan dari FAO (Federasi Agri Cultural Organization) kegagalannya adalah diprogram KB.

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan Swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Adapun Pelita V ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama, yang nantinya dilanjutkan oleh Pelita VI.

Program pembangunan yang dihasilkan adalah:

1. Pertanian
 - a. Meningkatkan produksi hasil pertanian

b. Menetapkan Swasembada pangan

2. Industri

a. Menghasilkan barang ekspor

b. Lebih banyak menyerap tenaga kerja

c. Menghasilkan mesin-mesin industri

Hasil pembangunan yang didapatkan ialah pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 %. Ekspor komoditas non-migas meningkat. Akan tetapi kegagalan juga didapatkan pada fase ini, dimana pelaksanaan pembangunan sudah mulai tidak merata lagi, pembangunan cenderung hanya di Pulau Jawa, tingkat korupsi tinggi, dan hutang luar negeri banyak.

Pelita VI diharapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada fase ini masih menitik beratkan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas SDM (sumber daya

manusia) sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan (Purwanto). Adapun program pembangunan yaitu:

1. Pengembangan geologi dan sumber daya mineral
2. Program pembangunan pertambangan
3. Program pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu

Sedangkan untuk pembangunan energi juga dikembangkan tiga program pokok pembangunan yang meliputi:

1. Program pengembangan tenaga listrik
2. Program pengembangan tenaga listrik perdesaan
3. Program pengembangan tenaga migas, batubara dan energi

Hasil pembangunan yang didapatkan pada 1987 ekspor non-migas telah melampaui ekspor migas. Kegagalan yang didapatkan pada fase ini adalah meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat terhadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%. Pada

periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Demikian adanya pertumbuhan penduduk merupakan suatu perubahan jumlah penduduk baik bertambah maupun menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami. Migrasi ada dua yaitu migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (imigrasi), dan yang dapat mengurangi penduduk disebut migrasi keluar (emigrasi).

Empat faktor tersebut terjadi pada Gampong Jantho Baru yang secara keseluruhan dapat terjadi seiring waktu dan di periodisasikan antara jumlah pertumbuhan penduduk Gampong Jantho Baru

dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Pertumbuhan penduduk di UPT Jantho I

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah penduduk
1	1986-1987	350	1512
2	1988-1989	367	1576
3	1990-1997	432	2133
4	1998-2001	97	210
5	2002-2005	203	912
6	2005-2008	246	968
7	2009-2010	280	1271
8	2013	305	1346
9	2020	329	1.251

Berdasarkan tabel tersebut pada masa awal pertumbuhan penduduk di UPT Jantho I di Gampong Jantho Baru mengalami peningkatan sebanyak 3% kenaikan jumlah penduduk selama 4 tahun awal penempatan hal ini disebabkan datangnya 17 kepala keluarga yang merupakan transmigrasi Swakarsa mandiri. Kedatangan transmigrasi Swakarsa ini dibiayai oleh masing-masing para transmigran, mereka hanya diberikan lahan seluas 2 hektar tujuannya mereka mengikuti program ini adalah mencontoh keberhasilan yang telah dirasakan oleh warga transmigran dari daerah asal yang sama dengan mereka sebelumnya yaitu untuk memperbaiki taraf

kehidupan sosial ekonominya (Ramadhani 2014).

Pada tahun 1991 UPT Jantho I menjadi gampong definitif dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat acara penyerahan ini dihadiri langsung oleh wapres Sudarmono untuk meninjau langsung keberhasilan program transmigrasi.¹ Puncak pertumbuhan tertinggi terjadi di Gampong Jantho Baru yaitu pada tahun 1991 hingga pada tahun 1997. Pada masa sebelum konflik peningkatan jumlah penduduk mencapai 20% dari jumlah awal penduduk gampong yaitu pada tahun 1986. Pertumbuhan ini menunjuk kan bahwa telah terjadinya penambahan kepala keluarga baru dari kepala keluarga sebelumnya.

Setelah Gampong Jantho Baru menjadi desa definitif banyak transmigran yang membawa sanak saudara dari kampung halaman mereka untuk tinggal bersama apalagi setelah mereka mendapatkan sertifikat tanah yang diserahkan oleh pemerintah setempat untuk menjadi hak milik

para transmigran. selain itu terjadi pertumbuhan dibidang sarana prasarana seperti infrastruktur, kesehatan, akses jalan raya serta taraf perekonomian yang semakin membaik membuat penduduk dari luar datang dan menetap di Gampong Jantho Baru.

Di Gampong Jantho Baru juga pernah terjadi penurunan dari segi jumlah penduduk yang sangat tinggi diperkirakan mencapai 78% yaitu terjadi pada tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2001. Kepala keluarga yang masih menempati Gampong Jantho Baru hanya mencapai 97 kepala keluarga dari 210 jiwa yang sebelumnya mencapai 432 KK dari 2133 jiwa. Di karenakan terjadinya konflik Aceh sehingga banyak dari mereka memilih untuk mengungsi dan menghindarkan diri dari berbagai ancaman, penculikan dan penyiksaan.

Sebagian dari mereka lebih memilih untuk berlindung dengan cara mengungsi ke rumah sanak saudara di luar Gampong Jantho Baru baik yang masih berada di

¹ Wawancara dengan Azmi Arsyad, 3 September 2020.

Aceh maupun kembali ke Pulau Jawa untuk mencari keamanan. Apalagi setelah terjadinya penculikan penduduk Gampong Jantho Baru yang bekerja di luar gampong sebagai buruh proyek jalan di daerah Seulimum. Penduduk gampong yang bertahan kebanyakan adalah transmigrasi lokal yang mayoritas penduduknya kebanyakan dari kabupaten Aceh Besar.

Pada awal tahun 2001 penduduk transmigrasi yang masih bertahan di Gampong Jantho Baru mulai was-was dikarenakan ada isu-isu yang tersebar yang bertujuan mengusir semua pendatang khususnya para transmigran Jawa agar keluar dari Aceh terkait hal tersebut banyak warga yang memilih mengungsi ke gampong lain. Biasanya para laki-laki mengungsi di mesjid-mesjid dan para perempuan mengungsi di gampong atau desa-desa lain dan kembali ke rumah masing-masing pada siang harinya.

Keamanan desa mulai kembali setelah di bangunnya pos-pos penjagaan di setiap gampong, keadaan ini membuat jumlah

penduduk Gampong Jantho Baru kembali meningkat apalagi setelah adanya perdamaian antara gerakan Aceh merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia.

Hal ini membuat warga kembali berdatangan ke Gampong Jantho Baru sehingga mulai terjadi kembali peningkatan jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk yang datang kembali ke gampong ialah penduduk lokal yang telah membeli tanah para transmigran yang telah pindah dan sebagian lainnya adalah transmigran Jawa yang kembali.

Jenis dan Bidang Tata Pencaharian Etnis Jawa

Pertanian dan Perkebunan

Pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan sangat diarahkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan, kemandirian, dan kelestarian fungsi lingkungannya secara berkelanjutan dengan sasaran yang ditetapkan yaitu untuk meningkatnya kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi dan terwujudnya kemandirian masyarakat. Untuk

mewujudkan sasaran tersebut maka dilaksanakan pembinaan secara bertahap yaitu:

1. Peyesuaian sebagai upaya adaptasi yang berlangsung 1,5 tahun.
2. Tahap pematapan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup transmigran selama 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun.
3. Tahap pengambagan sebagai upaya pengembangan lahan usaha produktif secara mandiri yang berlangsung selama 2 tahun berikutnya (Mirwanto 2014).

Untuk itu departemen transmigrasi memberikan pelatihan kepada para transmigran di lokasi transmigrasi agar mengetahui cara-cara tehnik bertani, mengolah tanah, dan mengolah hasil-hasil panen kemudian memasarkan hasil pertanian tersebut dengan baik. Juga memberikan peralatan-peralatan bertani, memberikan penyuluhan secara intensif agar para transmigran dapat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif sehingga menjadi

lahan yang optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Lahan yang diolah untuk diberikan kepada para transmigran terdiri dari 3 lahan yaitu:

1. Lahan perkarangan yang digunakan untuk mendirikan rumah dan perkarangan dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar.
2. Lahan usaha 1 digunakan untuk pertanian dan perkebunan dengan luas 1 hektar
3. Lahan usaha 2 digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan luas $\frac{3}{4}$ hektar sebagai lahan penunjang penghasilan pertanian dan perkebunan warga transmigran.

Sebelum adanya lahan usaha ini departemen transmigrasi memberikan bantuan jasad kepada setiap kepala keluarga selama 4 tahun. Setiap warga diberikan berupa bahan pokok yaitu: beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, tepung terigu, kacang hijau, susu, sarden dan telur.

Untuk jatah beras dihitung perjiwa sedangkan jatah yang diberikan untuk lauk pauk di hitung

per KK. Bantuan jaduk berupa beras diberikan untuk satu KK dengan jumlah anggota keluarga maksimal empat jiwa, apabila jumlah KK melebihi yang ditentukan tidak di tanggung oleh pemerintah.²

Pada saat awal penggunaan lahan usaha mereka hanya menanam pada lahan pekarangan dan lahan usaha I sedangkan lahan usaha II yang letaknya agak jauh tidak ada yang ditanami oleh warga dalam pengelolaan lahan usaha terdapat beberapa kendala dan banyak hambatan yang dirasakan oleh warga namun demikian mereka tetap mendapatkan pembinaan dari kepala UPT yang pada saat itu yang berguna sebagai wadah aspirasi para petani di mana tujuan utama ialah menjaga kekompakan para petani.

Keadaan awal di sekitar Jantho Baru yang masih dikelilingi semak belukar dan hutan membuat hewan dengan mudah masuk disekitar pekarangan dan lahan usaha I milik warga terutama hama babi dan tikus, permasalahan seperti dituntaskan dengan memakai kawat

kontak disekitar areal pertanian dan juga pembentukan tim pemberantasan hama.

Lahan usaha I ditanami warga dengan tanaman palawija seperti ubi kayu, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dikarenakan dalam waktu 3 bulan sudah berhasil di panen. Sedangkan lahan usaha II di tanami tanaman tua seperti pohon kopi, rambutan, mangga, dan kelapa.

Produksi Rumah Tangga

Dalam perkembangan usaha ekonomi para warga gampong Jantho Baru mengolah hasil pertanian berupa ubi kayu, kedelai, dan hasil pertanian lainnya diolah menjadi produksi makanan atau produksi rumah tangga berupa keripik, tempe, tape, tempe bacem dan tahu bacem yang kemudian akan mereka pasarkan atau mereka jual di pasar Jantho setiap harinya guna membantu perekonomian keluarga.³

Perikanan

Dalam perkembangan usaha masyarakat transmigrasi Jawa juga

² Wawancara dengan Mukhniyetti, 24 Agustus 2020.

³ Wawancara dengan Bibik Siti, 24 September 2020.

melakukan pengembangan usaha dari segi perikanan sebagai lahan usaha untuk menambah penghasilan/ sebagai penghasilan tambahan dan sampingan usaha perikanan ini tidak dijadikan sumber penghasilan utama bagi masyarakat transmigrasi.

Masyarakat transmigrasi melakukan budidaya ikan air tawar seperti mujair, lele, nila dan ikan mas. Perkembangan budidaya ikan ini dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Kolam ikan untuk Budidaya ikan ini banyak dibuat di halaman rumah warga dan ada juga yang membuat kolam ikan di tanah khusus untuk di jadikan kolam ikan.

Seiring dengan perkembangan budidaya ikan sekarang di gampong Jatho baru banyak di dirikan restoran maupun rumah makan khusus untuk menjual berbagai jenis ikan bakar seperti Rata Resto, Adem Ayam, Riung gunung, Puncak OJ.⁴

Asal Usul Etnis Jawa di Kota Jantho

Penempatan penduduk transmigrasi di Gampong Jantho Baru dilakukan pada tahap pelita III tahun 1985/1986. Mayoritas penduduk gampong Jantho Baru merupakan warga transmigran yang berasal dari beberapa wilayah yang ada di pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Transmigran pada tahap pelita III dilakukan secara bertahap sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992.

Dipilihnya Kabupaten Aceh Besar khususnya kota Jantho sebagai lokasi untuk transmigrasi UPT I Jantho Baru dikarenakan oleh luasnya lahan yang masih kosong dan tingkat penyebaran penduduk yang belum merata dan juga untuk penunjang perekonomian di Kota Jantho. Selain UPT Jantho I juga terdapat UPT lainnya yang jarak dan penempatan transmigrannya berbeda untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel penempatan penduduk awal UPT di kabupaten Aceh Besar (Dinas Sosial Ketenaga

⁴Wawancara dengan Juhanta 24 Agustus 2020

Kerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar).

Interaksi Etnis Jawa dengan Masyarakat Lokal

Transmigrasi Jawa dan masyarakat lokal memiliki perbedaan latar belakang dari segi bahasa, suku, ras dan kebudayaan. Dari perbedaan latar belakang tersebut masyarakat dapat memelihara harmonisasi dalam interaksi sosialnya yang berdampak dalam membangun sikap toleransi antara transmigrasi Jawa dengan masyarakat lokal (Novaisi 2019).

Interaksi di antara transmigrasi Jawa dengan masyarakat lokal yang ada di Gampong Jantho Baru di bangun dengan sangat baik mereka membangun hubungan sesama saling tolong menolong dalam semua keadaan baik ketika ada musibah maupun dalam hal bahagia.

Faktor pendukung dan penghambat Eksistensi Etnis Jawa

Infrastruktur

Pemukiman transmigrasi merupakan satu kesatuan pemukiman atau bagian dari satuan pemukiman yang diperuntukkan

bagi tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat bekerja bagi transmigran dalam rangka membangun masyarakat yang produktif, maju dan mandiri dalam suasana kehidupan yang harmonis, dinamis dan sejahtera.

Untuk pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan lokasinya harus berpotensi dalam mendukung pertumbuhan pembangunan di sekitar kota-kota yang terisolir. Lokasi UPT Jantho I merupakan wilayah yang terletak dekat dengan pusat Kota Jantho untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pertumbuhan wilayah tersebut baik dari infrastruktur maupun ekonominya.

Pembangunan infrastruktur di UPT Jantho I dimulai pada tahun 1984/1985 dengan disiapkan lahan, jalan, serta jembatan, lahan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi Aceh sebesar 900 Ha, kemudian dibangun jalan dan juga jembatan. Jalan yang dibangun sepanjang 23,6 km terdiri dari jalan poros dengan 7,2 km, jalan gampong dengan 6,7 km dan jalan penhubung

dengan 9,7 km selain itu juga terdapat jembatan dengan panjang 82 meter (Departemen Transmigrasi 1990).

Jalan merupakan syarat awal untuk pemukiman menuju lokasi UPT. Kondisi jalan di UPT Jantho I pada awal pembukaan hanya berupa jalan tanah yang telah dikeraskan/ditimbun dan jalan ini dapat dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat jalan ini merupakan jalan akses masuk utama gampong dari jalan utama Kota Jantho yang berjarak 9,7 km. Pada tahun 1997 baru diadakan pengaspalan jalan agar memudahkan warga untuk membawa dan memasarkan hasil produksi ke pasar-pasar terdekat di wilayah Aceh Besar khususnya pasar Seulimum guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Gampong Jantho Baru.

Sarana lain yang di bangun pada tahun 1985 yaitu rumah untuk para transmigran pada awalnya hanya ada 350 unit rumah yang dibangun, kantor UPT, rumah petugas, balai desa, balai pengobatan dan juga 2 mushala pancasila yang

terdapat di dusun suka makmur dan suka maju serta 1 gudang pangan untuk menyiapkan bibit-bibit dan penyimpanan pupuk bagi para transmigran yang akan tinggal di Gampong Jantho Baru.

Rumah yang dibangun seluas 5x7 meter yang terdiri dari 1 ruangan tempat tidur, dapur dan juga ruang tamu rumah para transmigran didirikan di lahan seluas $\frac{1}{4}$ hektar atau disebut pekarangan memasuki tahun kedua penempatan, rumah warga dilokasi transmigran mulai diadakan pemugaran dengan penambahan masing-masing satu ruangan tempat tidur setiap rumah kemudian diberikan alat-alat kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dan teko aluminium kemudian dilengkapi dengan fasilitas air bersih salah satunya dengan menggunakan sumur yang telah disediakan oleh jawatan transmigrasi dan ada juga warga yang berinisiatif dengan menggali tanah dengan alat seadannya untuk di jadikan sumur baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk tanaman palawija yang mereka tanam.

Penggunaan air bersih pada saat awal pemukiman memang harus seefisien mungkin dikarenakan sulitnya mencari air tanah dilokasi transmigran. Untuk sekarang ini penggunaan air bersih sudah sangat mudah dicapai karena sudah menggunakan air dari PDAM baik untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya.

Kebudayaan

Sebagai masyarakat yang menempati tempat/kawasan baru diperlukan upaya untuk saling mengenal terhadap lingkungan sekitarnya sehingga terjadi proses interaksi dan adaptasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Interaksi dan adaptasi inilah yang dapat menimbulkan budaya baru yang dikenal dengan istilah akulturasi kebudayaan, akulturasi budaya ini terlihat pada budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat transmigran di gampong Jantho baru.

Akulturasi budaya dapat dilihat dari bahasa yang digunakan,

awalnya bahasa ibu adalah bahasa yang sering digunakan oleh para transmigran. seiring dengan perkembangan dan seringnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama warga membuat masyarakat transmigran dapat memahami dan sudah bisa menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa Aceh begitupun masyarakat lokal sedikit demi sedikit dapat memahami bahasa Jawa.

Dalam hal kegiatan kerja sama terutama dalam bidang pertanian warga biasanya membantu dalam hal memudahkan pekerjaan seperti memotong dan mengangkut padi, mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan cara bergilir dalam mengusir hama terutama hama babi, mereka melakukannya secara serentak atau melakukannya pada waktu yang sama. Kegiatan ini disebut dengan royongan, bentuk kerja sama ini didasarkan atas dasar setia kawan.⁵

Kegiatan yang lain yang mengandung nilai kebersamaan adalah pecah bola yaitu kegiatan

⁵ Wawancara dengan Kamsyahrul, 27 Agustus 2020.

saling bantu membantu dalam hal perkawinan seperti memberikan barang-barang yang dibutuhkan antara lain gelas, panci, kuali, atau pun peralatan masak lainnya. Begitu juga dengan acara-acara lainnya dilakukan oleh warga dengan inisiatif dari diri sendiri dan dengan bantuan seadanya.

Dikarenakan asal daerah mereka berbeda-beda sehingga melahirkan kesenian yang berbeda pula di daerah Jantho baru. Penduduk yang berasal dari Jawa tengah biasanya memainkan sandiwara atau ketoprak, Jawa barat sering mempertunjukkan kesenian karawitan dan gendang puncak, Jawa Timur dengan menampilkan reong ponorogonya dan Aceh dengan tari seudatinya. Pertunjukkan inidigelar pada saat musim panen atau acara-acara penting lainnya seperti pada acara 17 Agustus, perkawinan, dan acara yang dilakukan oleh pihak gampong. Pertunjukan seni ini sering diadakan pada sore hari dan terkadang selesai pada pagi hari, atraksi-atraksi kesenian seperti ini semakin

mengikat mereka dalam rasa persatuan yang tinggi dan saling menghargai masing-masing daerah.

Terjadinya perpindahan penduduk pada tahun 2001 yang dikarenakan oleh masalah keamanan dari gampong Jantho baru membuat kegiatan budaya yang telah dilakukan hilang. Penduduk transmigran yang pindah kebanyakan pelaku dari atraksi-atraksi kesenian di gampong Jantho Baru sehingga pada saat ini pergelaran budaya yang menampilkan kesenian di daerah asal masing-masing pada saat acara-acara penting tidak ada sama sekali, dan hanya menampilkan band-band tunggal ataupun orkes Melayu.⁶

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran juga merupakan faktor pendukung karena ada juga masyarakat transmigrasi yang menikah dengan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan perkawinan menjadi faktor pendukung karena para transmigran yang telah menikah

⁶ Wawancara dengan Desih Nurani, 7 September 2020.

dengan masyarakat lokal akan tinggal di gampong Jantho baru.

Faktor Penghambat Eksistensi

Konflik

Masyarakat transmigrasi Jawa mendapat kendala pada saat situasi konflik. Kendala yang dialami pada saat konflik yaitu bertahan hidup dimasa konflik karena tidak adanya jaminan keselamatan bagi para Transmigran jika tetap tinggal di rumah masing-masing. Dalam keadaan konflik mereka juga tidak dapat bekerja dan mencari nafkah karena tidak adanya jaminan bagi masyarakat Jawa pada saat itu.

Banyak masyarakat Transmigran yang takut dan was-was dengan adanya konflik, banyak masyarakat lebih memilih mengungsi ke gampong lain ada juga yang mengungsi ke rumah saudara ke wilayah yang aman konflik dan ada juga yang memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing.⁷

Keamanan di Gampong Jantho Baru mulai kondusif setelah

dibangunnya pos-pos keamanan, keadaan ini membuat penduduk di Gampong Jantho Baru yang mengungsi pulang kembali ke rumah masing-masing. Setelah adanya perdamaian dan berakhirnya konflik keadaan kembali seperti semula namun warga yang sudah kembali ke kampung halaman memilih untuk tidak kembali dan rumah yang kosong akibat di tinggalkan oleh penghuninya kemudian di ganti dengan datangnya para pengungsi tsunami pada tahun 2004.

Kesimpulan

Hadirnya entis Jawa ke Kota Jantho tepatnya di Gampong Jantho Baru dikarenakan sebuah faktor yang mengharuskan mereka untuk pindah, disebabkan dengan kepadatan penduduk baik dari masyarakat Jawa sendiri maupun masyarakat yang merantau ke pulau Jawa sehingga masyarakat membuat peraturan untuk meminimalisir masyarakat dengan melaksanakan program Transmigrasi ke daerah-daerah yang minim penduduk

⁷ Wawancara dengan Azmi 10 September 2020

seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Agar penyebaran penduduk secara merata ke seluruh Indonesia.

Jantho merupakan salah satu daerah yang berada di Aceh dan bagian dari pulau Sumatra yang merupakan tempat yang didatangi oleh Etnis Jawa, karena daerah tersebut masih sangat terpencil dan masih merupakan hutan dan pergunungan sehingga masih minim penduduk.

Kedatangan Etnis Jawa ke Kota Jantho dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri dengan cara bertani, berkebun dan berdagang. Salah satu ekonomi yang dapat mereka kembangkan adalah bedagang atau lebih dikenal dengan menjual keripik di Jantho. Selain daripada itu bertani juga salah satu faktor dalam menunjang perekonomian mereka.

Adapun interaksi etnis Jawa dengan masyarakat lokal dapat memelihara keharmonisan interaksi sosialnya sehingga dapat membangun dengan sikap toleransi antar sesamanya. Faktor pendukung masyarakat Etnis Jawa di Kota

Jantho terutama sekali dalam bidang infrastruktur dimana masyarakat yang pertama sekali datang sangat didukung oleh pemerintah dengan dibangunnya rumah-rumah, sekolah, mesjid, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dalam bidang kebudayaan dimana masyarakat Etnis Jawa sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaannya sendiri dan juga menghargai kebudayaan masyarakat lokal yang ada disini juga terjadi akulturasi budaya dalam bidang bahasa, dan yang ketiga dari faktor pendukung adalah perkawinan campuran, sehingga melahirkan akulturasi-akulturasi budaya luar dengan budaya lokal.

Adapun faktor penghambat daripada eksistensi Etnis Jawa ialah konflik daerah yaitu masa konflik antara Aceh dan RI, hal ini menghambat perkembangan Etnis Jawa yang ada di Kota Jantho.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Amanda, Arizka. Anwar Yoesoef. Nurasiah. 2017. *Perkembangan Etnis Aceh Di Kota Takengon Tahun*

-
- 1950-2015, *Jurnal Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.* (2).
- Hidayah, Zulyani. 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ketanah Seberang: Transmigrasi Indonesia.* Jakarta: Gramedia.
- Poewadarminta. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: pusat Bahasa, 2008.
- Nova, Yosi. 2016. Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Study Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Mamangan.* (1).
- Mirwanto, Manuwiyoto. 2004. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Novaisi, Rosidah. 2019. *Interaksi Sosial Transmigrasi Jawa Dengan Masyarakat Lokal Dalam Membangun sikap Toleransi Pada Anak Usia Dini Di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah.* (Sarjana). Universitas Negeri Semarang.
- Purwanto, Putra. 2019. Strategi Dan Bentuk-Bentuk Informasi Transmigrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional. *Jurnal Keputakawanan dan masyarakat Membaca,* (2).35.
- Ramadhani, TM. (2014). *Perkembangan Desa Transmigrasi Jantho Baru kabupaten Aceh Besar 1984-2013.* (Skripsi). Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Rustiadi, Ernan. Junaidi, Transmigrasi Dan Pengembangan Wilayah, *Respository. Unja,*